PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Senin Tanggal: 18 September 2017 Halaman: 1

Kampung Lebih Cantik, Bau Limbah pun Pergi

MASUK ke wilayah Kampung RW 8 Keparakan Kelurahan Keparakan kita langsung disuguhi padatnya permukiman warga. Kanan dan kiri gang penuh rumah warga. Tapi ada yang menarik sebagian jalan kampung berupa paving blok dicat warna warni. Selain lebih cantik, pewarnaan jalan itu menjadi penanda hasil penataan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kini bau air limbah warga sudah tak ada dan saluran menjadi lancar.

"Sebelum ada sanitasi ini, saluran air limbah warga langsung dibuang ke sungai. Salurannya sering mampet dan bau banget. Sekarang bak-bak kontrol tertutup semua, lebih lancar dan bau sudah tidak ada," kata Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) RW 8 Keparakan Lor, Sugeng Riyadi saat berbincang dengan *Merapi* Jumat (15/9) sore. ***Bersambung ke halaman 9***

Kampung

Ya RW 8 Keparakan menjadi salah satu sasaran program Kotaku dari pemerintah. Wilayah itu selama belum memiliki sanitasi yang layak dan memenuhi syarat. Kini saluran sanitasi dibuat dengan septik tank biofil. Air limbah warga masuk dalam septik tank biofil dulu sehingga air yang dibuang ke sungai lebih ramah lingkungan.

Sugeng menyatakan tahun 2017 ini Program Kotaku kali pertama masuk ke wilayahnya. Pada tahap awal disalurkan dana Rp 350 juta untuk pembangunan sanitasi saluran air limbah warga. Kini sudah ada sekitar 232 meter saluran sanitasi yang sudah terbangun. Termasuk jalan paving blok sepanjang 750 meter dari rencana anggaran biaya untuk sekitar 680 meter. Masih ada dana Kotaku tahap kedua tahun 2017 sekitar Rp 150 juta yang belum dicairkan.

"Ternyata kebutuhannya sudah terpenuhi dan masih ada sisa dana. Kami juga sudah pesan paving blok lagi tinggal memasang," ujarnya.

Pelaksanaan Program Kotaku di Keparakan yang berupa pembuatan sanitasi saluran air limbah dan pemasangan jalan konblok itu mulai dikerjakan Agustus. Dia menyampaikan pengerjaan melibatkan sekitar 20 warga di Keparakan. Warga yang dilibatkan itu selama ini bekerja serabutan.

Selain lebih tertata warga juga mendapatkan upah tambahan dari pemberdayaan program Kotaku.

Sedang Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Wiramukti Keparakan, Desi Triyanto mengatakan sebenarnya warga sudah merencanakan penataan permukiman di tepi sungai dengan konsep Mundur Munggah Madep Kali (M3K), penataan bantaran sungai dengan Ruang Terbuka Hijau Publik serta penataan Rumah Tidak Layak Huni. Bahkan sudah ada sekitar 20 rumah warga yang menyatakan bersedia ditata dengan konsep M3K. Mengingat jarak rumah warga dari bantaran Sungai Code kurang dari 1,5 meter.

"Sayangnya program Kotaku tahun ini aturannya hanya untuk sanitasi dulu. Kami coba usul bangun jalan inspeksi di tepi sungai juga tidak boleh alasannya sempadan sungai. Ya kami ikuti aturan itu karena takutnya saat ada audit itu melanggar aturan sempadan sungai," tutur Desi.

Pihaknya berharap program Kotaku bisa lebih fleksibel menata kawasan kumuh lebih luas. Terutama di tepi bantaran sungai. Namun jika tidak memungkinkan diharapkan ada program lain yang bias menata. Dicontohkan pada program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunintas yang pernah digu-

lirkan sebelumnya bisa mengakomodasi penataan di bantaran sungai. Tapi kini program pemerintah pusat itu sudah tidak ada.

Sementara itu daerah aglomerasi, Desa Caturtunggal, Depok telah menerima bantuan untuk mengurangi kawasan kumuh. Desa ini menduduki peringkat kedua di Kabupaten Sleman yang memiliki kawasan kumuh seluas 23,52 hektar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta serta terdapat puluhan hotel, restoran dan perguruan tinggi, berdampak pada kepadatan jumlah penduduk baik warga Sleman maupun pendatang.

Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Caturtunggal, Kusmono belum lama ini menjelaskan, dari dua puluh dusun, terdapat delapan dusun yang memiliki kawasan kumuh. Yakni Karangmalang, Mrican, Papringan, Blimbingsari, Janti, Santren dan Nologaten.

Dusun Karangmalang, lanjutnya, merupakan daerah yang pertama kali menjalankan program Kotaku. Beberapa infrastruktur seperti prasarana jalan, pembangunan drainase, Instalasi Pengolahan Limbah (Ipal) hampir seratus persen telah diselesaikan. Bahkan telah memiliki hidran untuk mencegah kebakaran.

Di Dusun Mrican dan Papringan, program Kotaku masih dalam tahap permulaan. Pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan yaitu pengerasan jalan menggunakan paving blok serta pembuatan saluran drainase. Itupun baru berjalan sekitar 20 persen dari target yang ada. Begitu pula di Dusun Janti, pembangunan serupa sedang berjalan 10 persen. Pembuatan saluran drainase dan pengerasan jalan baru mencapai sepanjang 50 meter.

Dusun Nologaten, pengurangan kawasan kumuh pada tahun ini fokus pada pembuatan talud dan paving blok. Dana yang digunakan berasal dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp 500 juta. Pelaksana proyek ditangani dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Diperkirakan akhir September 2017 proyek tersebut telah selesai.

Untuk Dusun Santren dan Blimbingsari, penanganan kawasan kumuh sama sekali belum tersentuh. Direncanakan, tahun 2018 program tersebut baru mulai dilaksanakan.

"Dua dusun tersebut awalnya tidak mau dikatakan kawasan kumuh. Tetapi setelah dijelaskan dengan berbagai kriteria yang ada serta akan mendapat bantuan dana dari pemerintah mereka menerima dikatakan kumuh," ungkap Kusmono. **(Tri/Awn/Nef)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Keparakan 2. Dinas PUPKP	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005